

Judul : Jemaah Bakal Memikul Biaya Haji
Tanggal : Sabtu, 28 Januari 2023
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 2

Jemaah Bakal Memikul Kenaikan Biaya Haji

Kenaikan Bipih yang ditanggung jemaah lantaran saldo nilai manfaat Dana Haji terbatas

**Vendy Yhulia Susanto,
Lailatul Anisah**

JAKARTA. Jika usulan Kementerian Agama (Kemnag) disetujui, jemaah asal Indonesia bakal menanggung ongkos naik haji tahun 2023 yang jauh lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Usul dari pemerintah, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar calon jemaah haji tahun 2023 sebesar Rp 69,19 juta. Jumlah tersebut setara 70% dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98,89 juta.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2022 pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati BPIH sebesar Rp 98,38 juta. Perinciannya, Bipih yang ditanggung jemaah sebesar Rp 39,89 juta atau 40,54% dan nilai manfaat Dana Haji sebesar Rp 58,49 juta, setara 59,46% dan BPIH.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemnag Hilman Latief menuturkan, penyusunan pembiayaan haji tidak lepas dari pembiayaan di tahun-tahun sebelumnya. Kemnag mengidentifikasi komponen apa saja yang bisa disesuaikan, yakni yang mungkin bisa turun dan komponen biaya yang

terindikasi naik.

Hilman berkisah, situasi dan kondisi hotel di Mekah serta Madinah belum sepenuhnya pulih. Hotel-hotel banyak yang baru dibuka kembali setelah di masa pandemi Covid-19 berhenti beroperasi.

Delegasi haji dari berbagai negara pun saat ini sedang berlomba menjajaki penggunaan fasilitas hotel, dapur, maupun transportasi lokal di Arab Saudi. Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan, ada potensi kenaikan biaya.

"Untuk hotel-hotel tertentu kami sudah mendapatkan informasi kenaikannya tinggi sekali. Tetapi untuk yang biasa kita gunakan ini masih negosiasi dengan menggunakan anggaran yang lama," ungkap Hilman, Jumat (27/1).

Ia menyatakan, penyusunan

usulan Bipih mempertimbangkan data dan fakta dari berbagai aspek. Misalnya data dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), prediksi nilai tukar dolar Amerika Serikat, prediksi harga minyak dunia yang terkait dengan avtur dan

Tahun lalu, BPKH memberikan nilai manfaat sebesar Rp 6 triliun untuk kuota 50%.

prediksi inflasi.

Keberlanjutan dan keadilan penggunaan nilai manfaat untuk jemaah haji tunggu alias yang masih antre menunggu jadwal keberangkatan haji

juga ikut dipertimbangkan. Dus, Hilman bilang Bipih akan digodok secara cermat bersama dengan DPR dan pemangku kepentingan lainnya.

Perlu efisiensi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka meminta Kemnag cermat menganalisis mana saja komponen biaya yang bisa dihemat. Selain itu, ia meminta adanya rasionalisasi agar belanja kebutuhan haji bisa lebih efisien.

Misalnya mempertimbangkan jumlah hari haji, penggunaan kapasitas yang lebih di Bandara Jeddah, dan menjajaki penggunaan Bandara Thaif sebagai bandara haji untuk jemaah haji Indonesia.

"Kita ingin titik moderatnya, misalnya jemaah tidak membayar setinggi Rp 69 juta," ucap Diah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menjelaskan, saldo nilai manfaat Dana Haji pada akhir tahun 2021 mencapai Rp 20 triliun. Lalu nilai manfaat yang digunakan untuk penyelenggaraan haji dengan kuota haji 50% pada 2022 mencapai sekitar Rp 6 triliun.

Artinya, jika biaya Bipih yang dibayarkan jemaah haji tahun 2023 sama dengan jemaah haji tahun 2022, maka nilai manfaat yang digunakan sekitar Rp 12 triliun. Dengan demikian, saldo nilai manfaat Dana Haji yang tersedia untuk tahun 2024 tinggal Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun.

Dus, jika kemudian Bipih 2024 ingin disamakan dengan Bipih tahun 2022, maka nilai manfaat yang dibutuhkan sekitar Rp 12 triliun atau kurang Rp 9 triliun. ■

Perkembangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (juta rupiah)

Periode	Bipih (Yang Dibayar Jemaah)	Nilai Manfaat Dana Haji	Total BPIH
2017	34,89	26,90	61,79
2018	35,24	33,72	68,96
2019	35,24	33,92	69,16
2022	39,88	58,49	98,37
2023*	69,19	29,70	98,89

Ket: *) Usulan

Perkembangan Kuota Haji Indonesia (Orang)

Periode	Haji Reguler	Haji Khusus	Jumlah
2017	204.000	17.000	221.000
2018	204.000	17.000	221.000
2019	204.000	17.000	221.000
2022	92.825	7.226	100.051
2023*	203.320	17.680	221.000

*) Proyeksi

Sumber: Kemnag dan Riset KONTAN

■ INSENTIF PAJAK